



Solusi rumah susun untuk Code

Pemkot lobi Pemerintah Pusat

Oleh Rina Wibayani & Rizki Delsa
HARIAN JOGJA

JOGJA: Pemerintah Kota Jogja terus berupaya mengatasi masalah banjir lahar di Sungai Code. Salah satu yang dilakukan dengan melobi Pemerintah Pusat agar mengizinkan pembangunan rumah susun (rusun) sesuai lahan yang ada di Jogja.

Walikota Jogja, Herry Zudianto menjelaskan soal wacana rusun belum disetujui sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya sejauh ini pihaknya telah melakukan konsultasi dan ada aspek yang menjadi persoalan.

Menurut Pemerintah Pusat syarat yang ditentukan untuk pembangunan rusun harus menggunakan tanah seluas 3.000 meter persegi. Namun kata Herry, Pemkot mencoba menawar dengan luasan lebih rendah, sekitar 1.000 meter persegi.

Herry beralasan, tanah seluas ketentuan Pusat itu sulit didapatkan di Kota Jogja. "Susah cari tanah di Jogja seluas 3.000 meter persegi, kalau saya maksimal 1.000 meter, meskipun juga susah carinya minimal kami sudah punya bayangan," lanjutnya.

Kendati demikian, diimbuhkan Herry, pihaknya masih tidak mau menyebutkan dimana tempat yang menjadi bayangannya tersebut.

Ditambahkan Walikota, antara dirinya dan Gubernur DIY sudah memiliki ke-

sepahaman untuk penanganan bantaran Code. "Saya kira itu tinggal level teknis, karena untuk saya dan Gubernur sudah ok untuk itu. Ya mestinya instansi dan instansi, tanyakan lebih lanjut ke masing-masing instansi di Provinsi dan Kota, kalau saya secara politis dengan Gubernur sudah kok," ujarnya ditemui seusa menghadiri pertemuan dengan KPK di Hotel Santika, Senin (9/5).

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Provinsi DIY, Rani Syamsinarti menjelaskan penataan kawasan bencana lahar dingin di bantaran Kali Code harus dilakukan secara terintegrasi antara Pemprov dan Pemkot. Rani mengatakan mengutamakan dialog dengan warga.

"Untuk menangani masalah itu memang harus terintegrasi antara Kota dan Provinsi, dan kami mengutamakan dialog didalamnya," katanya.

Rani menjelaskan mengulas masalah tersebut perlu berhati-hati untuk menghindari munculnya persoalan yang ada di tengah masyarakat. "Ini belum *wayah* sebarakat karena harus hati-hati juga menyangkut banyak orang," lanjutnya.

Terpisah Warga RW 01 dan RW 02 Purwokinanti, Pakualaman mengadakan kerja bakti untuk meninggikan tanggul Kali Code, Senin (9/5). Pembangunan tanggul ini menggunakan dana padat karya yang diberikan pemerintah.

"Hari ini [kemarin] kami kerja bakti untuk meninggikan tanggul, dan pengerukan. Kalau *nunggu* dari Provinsi kan tidak akan maju. Ini hanya untuk mengatasi sementara," ujar Jamil Mahmudi, Ketua RW 01 Purwokinanti, Pakualaman.

Jamil mengatakan kedua RW ini mendapat bantuan Rp76 juta untuk membangun tanggul di bantaran Kali Code. Dana padat karya diambilkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

PENANGANAN CODE

<p>an Kepada Walikota Yogyakarta Vakil Walikota Sekretaris Daerah</p>	<p>Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Penanganannya tetap menunggu dialog, bagaimana hasilnya nanti karena dengan musyawarah kita mongstahui apa keinginan warga.</p>	
<p>an Kepada Walikota Jogja Herry Zudianto</p>	<p>Kami tetap mengutamakan hasil musyawarah, karena kami tidak mau dianggap mengusur warga.</p>	
<p>Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Zuhri Huda</p>	<p>Apakah ada yang mencukupi luasan lahan minimal dengan jarak 10 meter dari sungai? Tidak ada.</p>	<input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Biasa

• **KPKB & Linmas** ✓ **Netral**

• **Din. Kimpraswil** ✓ **Segera**

• **Din. Sosma kertrans** ✓ **Untuk diketahui**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana			
3. Kantor Penanggulangan Kebakara			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005